

## **STRATEGI PENDEKATAN KETERSEDIAAN DAGING NASIONAL DI INDONESIA**

**Oleh: Rochadi Tawaf dan Hasni Arief**

**Lab. Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor  
e-mail: [rochadi@yahoo.com](mailto:rochadi@yahoo.com); [hasnihf@yahoo.com.sg](mailto:hasnihf@yahoo.com.sg)**

### **ABSTRACT**

*This paper is the result of a national study on the availability of beef in order to realize the Self-Sufficiency Beef Program 2014. This study aims to determine: 1) the conditions of supply (domestic production and imports of beef and live feeder cattle) and demand (beef consumption), 2) the distribution of cattle from production centers to the center of the consumer; and 3) the factors that affect the availability of these. Based on the results of data collection cattle and buffalo undertaken in June of 2011 by the Central Bureau of Statistics show that the amount of 14.8 million head of beef cattle, dairy cattle 597.1 thousand heads and 1.3 million head of buffalo. According to Blue Print Beef Self-Sufficiency Program in 2014 that the conditions for beef self-sufficiency will be achieved if the total population of 14.2 million head of cattle with the ability of domestic production and imports amounting to 90-95% of 5-10%. However, based on the results of the analysis conducted shows that domestic production has only reached 61.88% (Blue Print pessimistic at 50.8%) and imported cattle and meat 18.75% 19.37%. Accordingly, the results of data collection data cattle and buffalo from Central Bureau of Statistic at this time, not yet in condition beef self-sufficiency. This study also showed that the availability of beef is largely determined at three critical points, namely: at the level of supply (farmers), logistics (Slaughter House), and distribution (the importation of beef and offal). Influence the availability of beef in the level of supply in West Java are determined by the price of beef 38.8%, 25.56% of demand, imports amounting to 18.83% of the feeder cattle, and feed at 15.93%, while exports and the number of farmers had no effect.*

---

*Key words: farmers, availability, distribution, supply, demand, self-sufficient in meat*

## PENDAHULUAN

Program Swasembada Daging sapi dan kerbau 2014 merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan hewani yang berbasis sumberdaya domestik. Keberhasilan program tersebut sangat tergantung dengan kondisi data statistik yang ada sehingga pendanaan untuk program tersebut dapat disusun secara akurat. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah melakukan Pendataan sapi dan kerbau tahun 2011, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kekinian mengenai kondisi ketersediaan daging nasional, khususnya perkembangan populasi sapi potong dan kerbau.

Berdasarkan hasil pendataan sapi dan kerbau yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah sapi potong 14,8 juta ekor, sapi perah 597,1 ribu ekor dan kerbau 1,3 juta ekor; dengan struktur sapi potongnya sebagai berikut: Jantan (3,85%) 4.713.800, dengan komposisi anak (30,68%) 1,446 jt , muda (38,52%) 1,815 jt, dewasa (30,8%) 1,451 jt; dan betina Betina (68,15%) 10.086.200 dengan komposisi anak (14,03%) 1,415 jt, muda (19,88%) 2,005 jt, dewasa (66,09%) 6,665 jt; sementara potensi stok sapi dan kerbau menunjukkan hal yang *pesimistic* terhadap ketersediaan daging nasional dalam rangka swasembada daging 2014. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung potensi stok sapi dan kerbau di Indonesia seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Potensi Stok Sapi dan Kerbau, 2011

Jenis Ternak	Jantan Dewasa (90%)	Betina Afkir (5%)	Jumlah
Sapi Potong	1.306 jt	0.333 jt	1.639 jt
Kerbau	0.154 jt	0.032 jt	0.187 jt
Sapi Perah	0.019 jt	0.015 jt	0.034 jt
Total	1.481 jt	0.38 jt	1.861 jt

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa produksi dalam negeri baru mencapai 61,88% sementara analisis pesimistic pada *Blue Print* sebesar 50,8 %. Untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan impor sapi bakalan sebanyak 18,75% dan daging sapi 19,37% (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Proyeksi *Supply* dan *Demand* Daging Sapi

No	Item	2010	2011	%
1.	<b>Impor :</b>			
	Sapi (ekor)	521.000	500.000	18,75%
	Sapi (setara daging kg)	93.780.000	90.000.000	
	Daging	120.000.000	93.000.000	19,37%
	<b>Total Impor</b>	<b>213.780.000</b>	<b>183.000.000</b>	
2.	<b>Produksi DN :</b>			
	Sapi (ekor)	1.912.162	1.980.000	61,88%
	Sapi (setara daging=Kg)	283.000.000	316.100.000	
3.	<b>Kebutuhan daging total</b>	<b>496.780.000</b>	<b>480.000.000</b>	
	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>237.600.000</b>	<b>240.000.000</b>	
	<b>Konsumsi/kapita/tahun</b>	<b>1.97 Kg</b>	<b>2 kg</b>	

Sumber: hasil analisis

Sehingga dapat dinyatakan bahwa kondisi saat ini “ Indonesia belum dapat dikatakan” sudah mencapai swasembada daging sapi. Selanjutnya, berdasarkan kriteria *Blue Print* Program Swasembada Daging sapi dan kerbau 2014, bahwa kondisi swasembada daging sapi akan dicapai jika jumlah populasi sapi 14,2 juta ekor dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 90—95% dan impor sebesar 5—10%.

## PERMASALAHAN KETERSEDIAAN DAGING NASIONAL

Tolok ukur ketahanan pangan dari sisi kemandirian dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan dalam negeri. Di dalam menyusun berbagai program prioritas dan kegiatan operasional yang mengikutinya, maka keseragaman dalam perhitungan *supply* dan *demand* sangat penting agar estimasi terhadap ketersediaan daging nasional tidak bias, yang mana semua asumsi dan tolok ukur yang digunakan didasarkan pada data statistik yang ada. Kenyataan menunjukkan adanya perbedaan antara hasil sensus dengan fakta di lapangan sebagaimana hasil perhitungan di atas, hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan di dalam mengestimasi kondisi *supply* dan *demand*. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penghitungan ulang secara keseluruhan dengan berlandaskan pada kondisi sesungguhnya di setiap sentra produksi dan pasar.

Selain persoalan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi masalah terkait dengan ketersediaan daging nasional yang dapat kita temui di lapangan. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyaluran ternak dari sentra produksi ke pusat konsumen

2. Harga sapi hidup yang cenderung menurun, sementara harga daging sapi cenderung meningkat
3. Impor daging sapi meningkat tajam sebagai akibat harga daging sapi yang cenderung meningkat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan masalah ketersediaan daging nasional, ada 3 kritikal poin yang harus dibenahi:

- 1) Produktivitas domestik, yang dihasilkan atau pasokan (peternak)  
Terkait dengan produktivitas domestik, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi: 1) harga sebesar 38,7%; 2) permintaan (*demand*) sebesar 25,56%; 3) impor betina sebesar 18,83%; dan 4) pakan sebesar 15,93%; sedangkan ekspor dan jumlah peternak tidak berpengaruh (Dispet Jawa Barat, 2010)
- 2) Pemotongan betina produktif yang tidak tercatat di RPH.
- 3) Importasi daging beku: tidak terkendalinya impor daging dan jeroan yang menyebabkan terdistorsinya harga daging sapi di pasar domestik

Permasalahan-permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari kondisi peternakan sapi potong di dalam negeri. Peternakan sapi potong dalam negeri pada tingkat *on farm* digerakkan oleh 2 (dua) sistem peternakan yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. Peternakan rakyat (*farming system*), ternak sebagai “rojo koyo” (*livestock* = aset hidup), yang mana hal ini dijadikan sebagai identitas “status sosial”
2. Perusahaan peternakan (industri peternakan), yang memiliki SOP dan berorientasi pada keuntungan usaha

Oleh karena itu, pembenahan peternakan sapi potong di dalam negeri terkait dengan ketersediaan daging nasional harus didasari pada kondisi peternakan sapi potong itu sendiri yang real di lapangan

## **STRATEGI KETERSEDIAAN DAGING SAPI**

Adapun strategi pendekatan yang dapat dijadikan sebagai pemecahan atas persoalan ketersediaan daging nasional adalah sebagai berikut:

- 1). Integrasi usahatani pola kawasan, dengan mempertimbangkan:
  - rasio ternak di lahan pertanian.
  - konsep leading sector dalam pengembangan kawasan, bukan komoditi unggulan. Konsep ini, akan mendukung pengembangan komoditi di suatu wilayah.
- 2). Restrukturisasi sistem agribisnis sapi potong; pada sistem agribisnis di tingkat on farm nilai tambahnya sangat rendah jika dibandingkan di tingkat off farm, oleh

karenanya perlu dilakukan pergeseran produk on farm yang semula hanya memproduksi sapi siap potong menjadi produk karkas. Artinya, RPH yang semula merupakan kegiatan pasca produksi, menjadi satu sistem onfarm. Maknanya, produk onfarm akan memiliki nilai tambah lebih baik dari sebelumnya.

3). Pembinaan peran para pelaku usaha:

- a. *Feedlot*: bagi pengusaha penggemukan sapi potong impor (feedloter) harus melakukan kemitraan dengan para peternak rakyat, yaitu sekurang-kurangnya 10 % dari sapi yang diimpor harus diplasmakan; hal ini akan terjadi *transfer knowledge* (teknologi) dari perusahaan kepada peternak rakyat; selain itu peternak rakyat akan memperoleh jaminan pasar dan fasilitas kredit. Selain itu, perusahaan feedlot, wajib menyerap produksi sapi lokal minimal 10 %, menyediakan produk sapi bakalan (bibit) sekurang-kurangnya 5%; dan juga melakukan program penyelamatan betina produktif.
- b. Sedangkan bagi Importir daging: diwajibkan melakukan penyerapan daging sapi lokal sekurangnya 10%, dengan wajib melakukan membina RPH; juga wajib mendukung program *breeding*. Cara yang dapat ditempuh dengan mengalokasikan setiap 100 ton daging sapi yang diimpor, pengusaha importir daging melakukan kemitraan dengan peternak rakyat sebanyak seekor sapi diperuntukkan untuk bibit. Pembiayaannya dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembinaan perbibitan nasional

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pendataan sapi dan kerbau, saat ini belum dapat dikatakan sudah berada pada kondisi swasembada daging sapi dan kerbau.
2. Ketersediaan daging sapi sangat ditentukan pada tiga kritikal poin: di tingkat pasokan (peternak), logistik (RPH), dan distribusi daging sapi (importasi daging dan jeroan)
3. Pengaruh ketersediaan daging sapi di tingkat pasokan ditentukan oleh: 1) harga (38,8%); 2) permintaan (*demand*) 25,56%; 3) import betina 18,83% ; dan 4) pakan 15,93%; sedangkan ekspor dan jumlah peternak tidak berpengaruh.

## **Daftar Pustaka**

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2009). Analisis Supply-Demand Bibit Sapi Potong Di Jawa Barat.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2009) Kajian Grand Strategi Bibit Sapi Potong Menunjang Jawa Barat Swasembada Daging Sapi.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2010) Kajian Sejuta Sapi di Jawa Barat.

Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia (2010) Eksistensi Feedlot Dalam Supply-Demand Daging Sapi Di Jawa Barat. Bandung, Forum Peternak Budaya Penggemukan Sapi Jawa Barat 2010